

# Geostrategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Produktivitas Ekspor Ikan

Laode Muhamad Fathun<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, lm\_fathun@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Paper ini akan menjelaskan geostrategi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi tersebut kemudian spesifik pada kepemimpinan Menteri Susi dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil perikanan Indonesia. Dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif melalui metode studi kasus, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai basis argumentasi. Hasil yang ditemukan adalah Menteri Susi menggunakan metode *geostrategic military projection* yang dikombinasikan dengan model kebijakan luar negeri konfrontasi dan *leadership*. Dengan metode tersebut lahirlah strategi penenggelaman kapal sebagai upaya untuk deterens, defensif, ofensif dan bahkan *compliance* dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan bentuk kemampuan mempertahankan kedaulatan NKRI. Artinya memiliki argumentasi politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, melalui kajian semoga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama kajian maritim.

**Kata Kunci:** Menteri Susi, *military projection*, geostrategis, *deterrence*, *defence*, ofensif, *compliance*, ekonomi politik

## ABSTRACT

*This paper will explain the geostructure of the implementation of Indonesian foreign policy in the context of the organizational approach. The organizational approach is specific to the leadership of Minister Susi in an effort to improve the productivity of Indonesian fisheries. With the type of descriptive qualitative research through the case study method, this paper uses secondary data as a basis for argumentation. The finding of this paper showed that Minister Susi used the geostrategic military projection method which was combined with foreign confrontation and leadership policies. With this method was born the strategy of sinking the ship as an effort to deter, defensive, offensive and even compliance in an effort to increase the productivity of fishery products and the form of the ability to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia. It means having political and economic arguments. Therefore, through the study, hopefully it can add to the repertoire of knowledge, especially maritime studies.*

**Keywords:** Minister Susi, *Military projection*, *geostrategic*, *deterrence*, *defence*, *offensive*, *compliance*, *political economy*

## Pendahuluan

Di era Jokowi ingin memperlihatkan *power politic* yang serius untuk mengkapitalisasi potensi maritim Indonesia secara komprehensif. Keseriusan Jokowi terlihat saat dibentuknya Badan Keamanan Laut dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 178 Tahun 2014

menyebutkan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai Inpres nomor 10 tahun 2015. Berdirinya dua lembaga ini yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang membawahi empat Kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan sebagai fungsi koordinasi utamanya. Jokowi ingin menunjukkan kembali kekuatan maritim adalah potensi kekuatan dan sumber ekonomi nasional yang perlu diinternasionalisasi.

Pada pertemuan diplomasi tingkat tinggi seperti di Beijing dan KTT Asia Afrika di Jakarta Jokowi menginternasionalisasi konsep politik maritimnya. Ada lima pilar kebijakan geopolitik maritim yakni upaya membangun budaya maritim, membangun infrastruktur maritim, mengkapitalisasi sumber daya maritim, penguatan diplomasi maritim serta pertahanan maritim. Jokowi mengarahkan Indonesia pada arah politik spasial maritim. Arah kebijakan politik luar negeri Jokowi membawa Indonesia memasuki abad “*geopolitics*”.

Teori ini, berangkat pada sifat negara yang *libensraum*, dimana setiap negara berlomba memperebutkan kekuasaan dominasi baik negara kecil maupun negara besar dalam spasial dunia. Pendekatan ini berorientasi pada hubungan keseluruhan antara politik dan geografi, ekonomi dan secara khusus berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Knox Paul mengatakan bahwa “*is the state 's power to control space and territory and shape foreign policy of individual states and international political relations*”<sup>1</sup>. Dalam konteks ini memaknai lingkungan akan berpengaruh terhadap strategi yang akan diterapkan suatu negara untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya sebagai bentuk aplikasi dan terjemahan dari Politik Luar Negerinya. Sehingga, dalam memaknai lingkungan strategis geopolitik inilah akan melahirkan tindakan yang kemudian disebut dengan geostrategi.

Dalam prinsip Politik Luar Negeri Indonesia yakni “bebas aktif”, bebas diartikan bahwa Indonesia tidak memihak pada satu blok

manapun baik barat maupun timur. Sedangkan aktif berkaitan dengan cita-cita UUD 1945 seperti aktif menjaga ketertiban dunia. Artinya bebas di sini bukan lagi berarti tidak berpihak pada blok ideologi tertentu, tetapi memiliki restorasi makna misalnya bebas dalam arti menjalin kerjasama dengan negara manapun demi atas nama kepentingan negara.

Perlu dibedakan dahulu bahwa Politik Luar Negeri adalah identitas suatu negara yang menjadi ciri khas atau keunikan negara tersebut dalam hubungan eksternalnya atau abstraksi dari negara tersebut yang diambil dari nilai-nilai dan budaya negara itu. Dalam makna lainnya Politik Luar Negeri adalah refleksi kebutuhan dari negara yang bersangkutan yang akan dipengaruhi oleh kebutuhan domestik yang sejalan dengan kebutuhan eksternal. Di sisi lainnya, kebijakan luar negeri adalah strategi yang harus dicapai atau legitimasi dan cara untuk mewujudkan Politik Luar Negeri itu.

Pemahaman terhadap Indonesia sebagai lingkungan strategis yakni sebagai negara yang memiliki geopolitik yang baik membuat model kepemimpinan berbeda dalam menterjemahkan dalam setiap kebijakan. Konteks inilah yang kemudian disebut dengan geostrategi. Geostrategi merupakan satu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya untuk mewujudkan tujuan politik atau cita-cita nasional, sedangkan upaya itu sendiri akan terwujud sebagai program-program di dalam pembangunan nasional. Dalam studi Hubungan Internasional, geostrategi merupakan suatu kajian yang melihat masalah hubungan internasional dari sudut pandang strategisnya suatu wilayah. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hierarki aktor dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Pengertian geostrategi dapat lebih disederhanakan lagi. Geostrategi adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah strategi

<sup>1</sup> Makmur Suprianto, Tentang Ilmu Pertahanan (pp. 358). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.

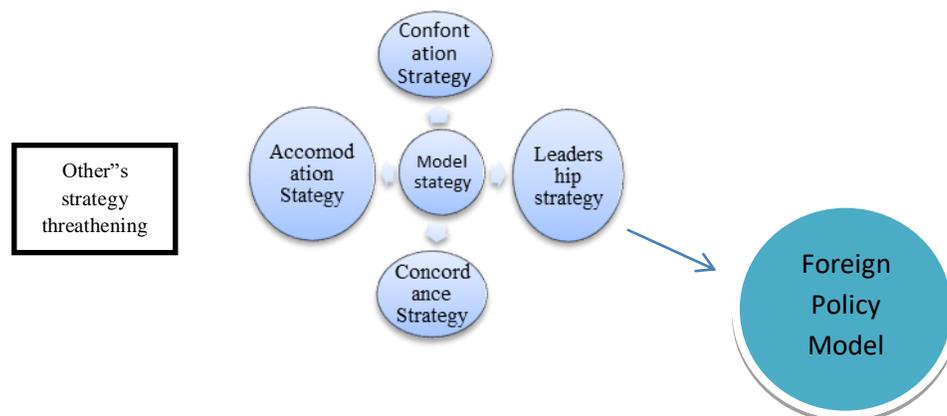
wilayah, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. Geostrategi mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Dalam menganalisis kedua implementasi kebijakan luar negeri di atas yakni isu maritim, maka penulis fokus menggunakan pendekatan Feminisme untuk melihat geostrategi yang diterapkan masing-masing pemimpin sebagai refleksi dari implementasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Fokus dari paper ini adalah menganalisa model kebijakan luar negeri Indonesia dengan mengambil sudut pandang feminisme. Pendekatan ini akan menjadi pisau analisis dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Sehingga akan ada korelasi dalam analisis teori kebijakan luar negeri Indonesia dengan menggunakan implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang akan difokuskan pada aktor utama yakni Menteri KKP (Susi Pudjiastuti). Artikel ini menggunakan level analisis negara dengan spesifik pada peran kepemimpinan organisasi dalam sub-negara oleh menteri KKP. Srikandi Indonesia ini memiliki peran yang signifikan dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengelolaan aset produktivitas ekspor ikan Indonesia di luar negeri dan mengukurnya dari tiga asumsi dasar yakni peran, kontrol dan akses.

## Kerangka Teori

Model adalah skema yang digunakan untuk menganalisis munculnya kebijakan politik luar negeri. Model yang dikembangkan oleh William D. Coplin dengan strategi aktor rasional. Model ini menitikberatkan pada kalkulasi rasional aktor. Model ini bertumpu pada situasi sistem internasional, persepsi aktor, politik elit, kapabilitas negara serta strategi negara lain. Prespektif ini merujuk pada (1) *leadership strategy* yang berkaitan dengan upaya menghilangkan kekerasan dalam setiap masalah kebijakan luar negeri, (2) *concordance strategy* mengacu pada upaya saling menguntungkan (3) *accommodation strategy* artinya keseimbangan ketika ada negara yang dominan kapabilitasnya, dan (4) *confrontation strategy* ketika kemampuan suatu negara meningkat dan tidak bisa diimbangi. Model selanjutnya adalah *model incremental*. Model ini berasumsi akan ketidakpastian dari situasi lingkungan sehingga aktor harus melakukan penyesuaian sebelum melakukan pengambilan keputusan.

### Model William D. Coplin<sup>2</sup>



Model ini akan digunakan untuk mencari pola strategi yang digunakan untuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks kelembagaan yakni KKP yaitu antara Susi Pudjiastuti Model ini akan melahirkan geostrategi. Dalam studi Hubungan Internasional:

Menurut Tal Tovy *Geostrategy links geography with strategies of war. It places the planning and management of war in the context of geographical, physical, and artificial (man-made) characteristics of the operational region. Geostrategy also demands a precise inspection of the geographical characteristics of an area from the point where military forces deploy until the desired destination. According to*

*Geoffrey Sloan and Colin Gray, geography is “the mother of strategy”.*<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Adam Hendri E.Eccles<sup>3</sup> menyampaikan bahwa strategi adalah pengerahan kekuatan secara menyeluruh untuk pengendalian situasi dan daerah demi tercapainya pengendalian daerah operasi sehingga tercapai keunggulan terhadap pihak lain. Menurutnya ada empat hal yang harus menjadi poin penting yaitu strategi itu sendiri, taktik yang digunakan, persediaan logistik, dan informasi dari intelijen. Maka sistem akan

tercipta dalam bentuk komando, komunikasi, komputerisasi dan informasi

Geostrategi menyangkut tiga pertanyaan yakni **pertama, siapa kita** menyangkut apa yang kita miliki yaitu kapabilitas, integritas atau potensi yang kita miliki yang sering disebut dengan *national power*. **Kedua, apa keinginan kita** menyangkut target capaian atau keinginan yang menjadi sasaran yang sering disebut dengan *national interest* serta **ketiga, bagaimana mencapai tujuan itu** atau dikenal dengan *tactics* atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut *human geography* yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *physical features*. Sehingga geostrategi adalah cara yang harus ditempuh oleh aktor untuk mencapai keinginannya. Dalam teori kebijakan luar negeri K.J Holsti menyebutnya sebagai tindakan. Dengan demikian, geostrategi dapat menggunakan Teori Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* bahwa strategi memiliki tiga pendekatan yakni *military role*, *constabulary role* dan *diplomacy role*<sup>4</sup>. Implementasi tiga peran ini dalam penyelesaian setiap kasus yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia. Sehingga, akan ditemukan dari dua aktor yang menjadi sampel geostrategi apa yang diterapkan dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melibatkan sensitivitas sebagai aktor perempuan dalam politik internasional.

#### a. Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi

Setelah Jokowi dan JK resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2014 yang lalu tentunya setiap presiden memiliki persepsi dan mimpi untuk mensejahterakan rakyatnya sebagai jawaban atas

<sup>2</sup> Tal Tovy, *The Changing Nature of Geostrategy 1900–2000: The Evolution of a New Paradigm*. Alabama: Air University Press Air Force Research Institute.

<sup>3</sup> Dicky Stefanus dan Eko Adiyanto, *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini*. Jakarta: Gramedia. 2015.

<sup>4</sup> Ibid.

janji-janji politik yang disampaikan semasa kampanye. Di atas telah dideskripsikan bahwa Jokowi ingin membawa arah baru kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan konsep dari Soekarno yakni sebagai Negara Bahari. Namun, perbedaannya adalah kondisi dan situasi sangat berpengaruh dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Di era Jokowi dalam kepemimpinannya adalah kembali melihat Indonesia dari sudut pandang geopolitik maritim. Teori geopolitik seperti Ratzel, Ritter yang menekankan pendekatan ruang hidup Negara (*organism determinist, living space*) yang berorientasi *continental*. Alfred Thayer Mahan merupakan pelopor orientasi maritim merupakan sejumlah menekankan bahwa kekuatan laut merupakan kekuatan dominasi negara untuk menguasai dunia (*sea power maritime*) dan Sir Harold Mackinder dengan konsep *Heartland Theory* merupakan sejumlah pemikir yang mungkin menjadi inspirasi pemerintahan Jokowi-JK<sup>5</sup>.

Realitas ini menunjukkan bahwa ada relativitas hubungan antara negara dengan lingkungan tempat hidupnya atau wilayah geografinya. Mahzab Ratzel menganggap bahwa faktor alam atau geografi akan berpengaruh pada kebijakan negara atau *the state political power*. Mazzab Ratzel menganggap pengaruh letak geografi (bentuk, luas, sumber daya alam, sumber daya manusia, letak) merupakan indikator tumbuh dan berkembangnya suatu negara (*organisme hidup*). Ratzel meramalkan bahwa konstelasi politik dunia akan didominasi antara negara maritim dan kontinental dalam menguasai dunia bahkan menyebutkan bahwa Samudra Pasifik adalah kehidupan masa depan negara<sup>6</sup>.

Dalam konteks inilah Jokowi melakukan adaptasi terhadap masalah-masalah tersebut.

Faktualnya walaupun Jokowi bukan orang berpengalaman di dalam hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, sebagai kepala negara Jokowi harus melibatkan diri dan sebagai tanggung jawab kepemimpinannya. Jokowi sebagai presiden harus bisa menginterpretasi kebutuhan domestik yang sejalan dengan kebutuhan eksternal. Adaptasi Jokowi melihat kondisi internal yang harus diinternasionalisasi.

Dari empat model adaptasi yang dalam teori Rosenau<sup>7</sup> yakni hanya tiga yang menurut penulis tepat pada adaptasi Jokowi yakni: a) *preservative adaptation* (sikap responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal); b) *acquiescent adaptation* (bersikap peduli pada perubahan internal dan eksternal); c) *intransigent adaptation* (sikap responsif terhadap lingkungan internal). Berangkat dari tiga masalah bangsa di atas kemudian Jokowi ingin mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim melalui kebijakan poros maritim.

Orientasi keseriusan Jokowi ini terlihat pada forum KTT Asia Timur Jokowi berpidato tentang landasan kebijakan maritimnya dalam lima pilar yakni **Pertama**, akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudra. **Kedua**, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. **Ketiga**, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas

<sup>5</sup> Laode Muhamad Fathun, Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi. *Power in International Relations 1, 2*. (2017).

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> James N. Rosenau, *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing. 1981.

maritim, dengan membangun Tol Laut, *deep seaport*, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. **Keempat**, melalui diplomasi maritim, menjaga semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. Jokowi mengatakan berupaya menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan pemisah antar negara. **Kelima**, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

#### **b. Implementasi Geostrategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pendekatan Idiosinkretik**

Tipologi kepemimpinan karakter Menteri Susi lebih dekat dengan aktif negatif, tipe ini memiliki masa lalu yang “kelam”, dimana kebanggaan dirinya sewaktu kecil tidak baik sehingga akan mencari berbagai cara untuk mencapai kebanggaan. Tipe ini sangat kaku dimana perilaku politik dianggap sebagai beban kerja dan tanpa kompromi. Kepemilikan kekuasaan adalah cara untuk meningkatkan kebanggaan diri. Argumentasinya bahwa karakter Menteri Susi cenderung selalu menjadi bagian dalam penyelesaian masalah, tidak kaku, serta selalu mengutamakan kinerja yang bereputasi.

Selama Menteri Susi menjadi pemimpin walaupun seorang perempuan di KKP Menteri Susi selalu mengutamakan kinerja positif terhadap hasil KKP. Barangkali dengan terminologi di atas tidak cocok untuk tipe ini karena masa lalu dan kasih sayang yang didapatkan oleh Menteri Susi tidak baik semasa

kecil. Faktanya Menteri Susi sampai putus sekolah. Justru penulis berpikir sebaliknya, dimana argumentasinya adalah tidak ada satu orang pun orang tua yang tidak menyayangi anaknya dan menginginkan untuk mendapatkan prestasi. Fakta lainnya adalah Menteri Susi hidup dengan didikan orang tua di kalangan pengusaha dengan karakter kental budaya Jawa Tengah.

Kemudian setelah hidup di Jawa Barat yang kulturnya berbeda, Jawa Barat cenderung memikirkan empat hal yakni *nyekolah*, *nyantri*, *nyunda* dan *nyaa* (kasih sayang). Namun, perlu disadari bahwa kata negatif jika diukur dari Menteri Susi putus sekolah maka sebenarnya Menteri Susi pada saat itu tidak berminat dengan kekakuan. Pada era itu Menteri Susi senang melahap buku-buku karya Marxisme. Menteri Susi aktif membaca karya-karya besar dan menjadi pola pemikirannya. Dampaknya adalah Menteri Susi tidak begitu nyaman dengan belajar di kelas.

Dalam analisis ini mengacu pada konteks **peran** menjadi pendekatan akibat trauma dilema keamanan domestik. Sehingga pendekatan geostrategi *soft* militer menjadi cara yang terbaik untuk mengusir adanya perilaku ilegal di wilayah NKRI. Dilema tersebutlah yang menjadi ontologi Menteri Susi untuk melakukan penenggelaman sebagai cara untuk memanfaatkan kepentingan aset negara untuk kepentingan nasional bukan kepentingan aktor lainnya. Akibat kegiatan ini bahkan Menteri Susi sempat adu argumen dengan Menteri Koordinator bidang maritim yakni Luhut Bisar Pandjaitan, dimana kedua belah pihak tidak sependapat terhadap aksi penenggelaman. Peran Menteri Susi dengan metode penenggelaman justru akan mengklaim Indonesia sebagai negara yang anarkis. Anarkis dalam arti bahwa tidak memiliki rasa kasihan terhadap pelaku pencuri ikan. Menurut penulis justru logika ini terbalik, berangkat dari dilema masa lalu dimana hasil tangkap nasional yang menurun dengan metode penenggelaman akan bermakna positif terhadap

pengelolaan kedaulatan, kesejateraan dan keamanan Indonesia sebagai negara maritim.

Dikutip dari [detik.com/15/12/2018](http://detik.com/15/12/2018), ada empat argumentasi Menteri Susi melakukan hal ini yakni a) sebagai upaya implementasi dari UU/45/2009 tentang perikanan terkhusus pasal 69 dan 76A, tentunya untuk menjaga hasil tangkap nasional, b) kegiatan ini merupakan implementasi dari upaya penegakan hukum di laut yang merupakan instruksi presiden Jokowi untuk menjadi desakan efek jera, c) mekanisme pelepasan kapal yang diinstruksikan oleh Menteri Luhut merupakan salah satu cara untuk efek jera para pelaku pencuri ikan, namun aktivitas tersebut tidak akan mengurangi para pencuri ikan karena tetap kapalnya masih ada. Kekhawatirannya adalah jika kapal itu dibeli oleh pemodal-pemodal yang bisa saja bagian dari aktivitas ilegal tersebut dan d) dalam hukum para pelaku selama ini tidak bisa dikenakan sanksi penjara bagi badan mereka dan kapal. Hukuman denda yang dibayarkan kepada negara sangat kecil.

Fenomena ini seperti bertentangan antara logika dan aksi yang dilakukan. Perlu digarisbawahi bahwa feminisme bukan berarti lemah. Logika yang di pakai oleh Luhut adalah logika kesesuaian (*appropriateness*), sedangkan logika yang dipakai oleh Menteri Susi adalah logika konsekuensi (*consequences*). Artinya, ada perbedaan besar dalam implementasi aksi dalam memaknai kerugian negara. Menteri Susi yang basisnya adalah sipil dan Menteri Luhut yang basisnya militer, justru aksi Menteri Susi yang cenderung realis. Dengan pendekatan ini justru penulis memiliki pandangan yang berbeda yaitu dimana seorang perempuan lebih kalkulatif dan memikirkan konsekuensi untung rugi dibandingkan Menteri Luhut. Hal ini adalah pemikiran feminisme dimana sebuah pembuktian bahwa perempuan bisa lebih tegas dalam advokasi kepentingan negara. Penulis berargumen bahwa juga terletak ada aksi baik menggunakan logika harmonisasi dan

konsekuensi untung rugi. Artinya aktivitas ini adalah kesetaraan peran yang dibingkai dengan aksi konkrit karena menghitung kerugian yang terus berulang. Karena, poin dasarnya pola melakukan aksi, dan melalui aksi ini membuktikan bahwa yang bisa melakukan aktivitas koersif bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan.

Disisi lainnya dengan peran menteri Susi melalui metode penenggelaman dalam konteks keamanan maritim bisa menjadi tiga makna *deterrence* dimana aktivitas penenggelaman adalah bentuk konkrit menakuti pencuri ikan secara ilegal untuk tidak melakukan aktivitas tersebut. Pesan yang ingin disampaikan adalah konsekuensi dari pencuri ikan ilegal dipastikan kapalnya akan ditenggelamkan.

Implementasi geostrategi ini kemudian penulis mengatakan bahwa ada dua kemungkinan manfaat yang bisa diterima dari implementasi kebijakan luar negeri konfrontasi dengan para pelaku ilegal dengan karakter idiosinkretik Susi Pudjiastuti yaitu: pertama strategi *deterrence*, *defensive*, *offensive* dan *compliance* serta geostrategi ekonomi. Faktualisasi strategi pertama dalam kajian keamanan, *deterrence* adalah upaya untuk menakuti lawan dengan efek psikologis. Strategi penenggelaman yang dilakukan oleh KKP adalah bentuk *deterrence* Indonesia untuk menyikapi banyaknya tindakan perilaku pencurian ikan secara ilegal di laut Indonesia. Tujuannya adalah untuk menakuti para pencuri ikan untuk tidak melakukan perilaku yang sama. Artinya daya ledak itu dengan penghancuran kapal adalah upaya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa “apabila kamu mencuri ikan maka saya akan ledakkan kapal kalian”. Namun, faktanya tidak semua para pencuri ikan itu takut atau jera bahkan kejadian meningkatnya pencurian ikan membuktikan bahwa status *deterrence* meningkat menjadi *defensive* dan *offensive*. KKP menerapkan dua strategi ini adalah untuk membuktikan bahwa upaya penenggelaman

kapal yang dilakukan oleh KKP merupakan bukti konkrit pertahanan (*defensive*) dan penyerangan (*offensive*) kepada para pencuri ikan. Artinya kedua strategi ini: *defensive* berupaya untuk tetap konsisten menjaga kedaulatan negara yang dimasuki oleh nelayan asing tanpa ijin. Di sisi lainnya adalah dengan *offensive* membuktikan keseriusan Indonesia tidak gentar dengan negara manapun ketika mereka melakukan pelanggaran sekalipun ada dalam region yang sama yaitu ASEAN. Di sisi lainnya upaya ini merupakan bukti konkrit doktrin KKP untuk menjaga hasil produksi KKP yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan nasional secara makro dan mikro. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan berbahaya bagi Indonesia itu sendiri (makro) dan nelayan (mikro). Pada tahun 2003 sampai 2013, data BPS (KKP, 2018) menunjukkan jumlah rumah tangga nelayan hanya berjumlah 900.000 orang yang awalnya 1,6 juta. Fakta lainnya adalah ada 115 perusahaan pengelolaan ikan harus bangkrut karena perilaku pencurian ikan yang hasilnya dibawa keluar negeri. Lebih lanjut, akibat *illegal fishing*, penelitian oleh *International Union for Conservation of Nature* mengatakan bahwa pada tahun 2050 pendapatan pengelolaan ikan Indonesia bisa anjlok hingga 40%. Selain itu, berdasarkan kajian UCSB dan Balitbang Kelautan dan Perikanan, terdapat kemungkinan hasil perikanan Indonesia anjlok hingga 81 % pada tahun 2035. Hasil evaluasi menunjukan kegiatan pencurian ikan secara ilegal berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional dimana para pencuri ikan menggunakan alat tangkap *trawl* dan tidak membayar pajak serta melakukan perbudakan serta penyelundupan. Dengan berlandaskan trauma tersebut maka sebagai bentuk upaya *compliance* Presiden Jokowi kemudian mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) pada tanggal 19 Oktober 2015 atau yang dikenal dengan Satgas 115. Satgas

(KKP, 2018) ini merupakan organisasi multi-agensi untuk mendukung misi KKP memberantas *illegal fishing*. Organisasi ini beranggotakan TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan Republik Indonesia dengan tugas penyelenggara penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system*).

Satgas ini memiliki empat wilayah operasi yaitu Perairan Aceh, Perairan Natuna, Perairan Arafura, Perairan Sulawesi dan Maluku bagian Utara. Satgas ini telah berhasil menangkap 317 kapal pelaku *illegal fishing* serta menenggelamkan 115 kapal yang berbendera Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Satgas 115 juga dilengkapi dengan Puskodal yang merupakan integrasi teknologi informasi dalam memaksimalkan kegiatan operasi. Selain itu, dalam upaya lain Satgas 115 bekerjasama dengan Norwegia, Amerika Serikat, Australia, INTERPOL dan UNODC. Hasilnya, kapal FV Viking dan kapal FV Hua Li 8 yang merupakan target pengejaran internasional. Selain itu, sampai dengan bulan Maret 2017, tercatat total 294 kapal ditangkap terkait dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal dengan rincian 116 Kapal Indonesia dan 66 Kapal Asing, berbendera Indonesia 116, Malaysia 6, Vietnam 54, Filipina 5 dan Taiwan 1.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut kemudian mampu meningkatkan hasil ekspor ikan Indonesia keluar negeri. Artinya pencurian ikan secara ilegal dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Sehingga, dalam kajian strategi keamanan dengan karakter Menteri Susi mampu menjadikan pendekatan *deterrence*, *defense*, *offense* dan *compliance* kepada pelaku pencuri ikan dari luar negeri bahwa Indonesia bisa berdaulat hukum terhadap wilayahnya sendiri dengan untuk menciptakan kesejahteraan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Implementasi geostrategi lainnya menyangkut dengan kebutuhan ekonomi yang berhubungan dengan ekspor Indonesia terhadap hasil KKP.

### Gambar 1. Pelaku IUU Fishing



sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Data KKP (2018) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hasil perikanan Indonesia meningkat 3,35 juta ton atau naik 11,3 persen dari tahun 2016 yang hanya menembus angka 3.01 persen. Jumlah tangkapan ikan nelayan yang meningkat membuat nilai ekspor hasil perikanan Indonesia juga melonjak. Pada 2016, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai 4,17 juta dollar AS, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang senilai 3,94 juta dollar AS. Adapun hingga April 2017, ekspor perikanan Indonesia mencapai 1,3 juta dollar AS. Di sisi lain, impor ikan nasional cenderung rendah. Secara global, kini Indonesia merupakan eksportir terbesar keenam setelah China, Norwegia, India, Chile, dan Ekuador. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBK KKP pada 2016 mencapai Rp. 462 miliar, tertinggi dalam sejarah.

Walaupun Indonesia menempati posisi ketiga untuk ekspor ikan di ASEAN setelah Thailand dan Vietnam. Dengan demikian, penerapan geostrategi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam meningkatkan hasil ekspor nasional dan pendapatan nelayan nasional memiliki dampak signifikan.

Dengan menggunakan metode peneggelaman yang disebut dengan strategi menakuti psikologis, bertahan, menyerang dan upaya untuk menegur para pencuri ikan untuk patuh pada aturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan orientasi geo ekonomi juga menjadi landasan paradigma Menteri KKP untuk menciptakan pengelolaan potensi KKP yang mensejahterakan masyarakat yang berkelanjutan diiringi dengan perlindungan terhadap kedaulatan NKRI dari kejahatan perilaku para pencuri ilegal.

Mengapa aktivitas peneggelaman ini penting, dalam konteks analisis psikologis bahwa tentunya seperti karakter aktif negatif ketika diberi kekuasaan maka hal terbesar yang dilakukan adalah untuk merubah citra menjadi reputasi. Selama ini Indonesia diklaim sebagai negara yang tidak maksimal dalam mengelola hasil laut namun setelah Menteri Susi memimpin terjadi lonjakan signifikan terhadap hasil ekspor Indonesia keluar negeri. Di sisi lainnya adalah karakter aktif negatif selalu berupaya menyelesaikan masalah dengan yang selama ini dianggap urgen dan kaku. Mengapa kaku, karena selama ini pengelolaan hasil laut berjalan

stagnan. Lebih lanjut, dengan karakter Menteri Susi membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan tidak kalah hebatnya dengan laki-laki ketika dihadapkan dengan masalah yang akut dan terus berulang. Dengan pemikiran Marxisme yang selama ini dikonsumsi oleh Menteri Susi bisa menjadi landasan kognitif dalam setiap implementasi kebijakan. Landasan kognitif menjadi domain utama dalam implementasi kebijakan bukan pada perempuannya. Artinya fenomena tersebut bukan lagi menjadi subordinasi dalam penyelesaian masalah namun justru menjadi aktor yang terlibat langsung. Lebih lanjut, Bourdieu menyebutnya dengan *field* yang mana mengandung makna hubungan kekuasaan dengan aktor atau ranah kekuasaan digunakan untuk apa. Ketika kekuasaan digunakan sebagai legitimasi objek maka akan menentukan posisi dan otoritas yang akan digunakan dalam memaknai realitas. Selain itu, hubungan antar agen harus terjalin korelasi terutama dalam kepentingan ekonomi yang deterministik.

Melihat tindakan Menteri Susi yang cenderung realis, menurut penulis argumentasi dasar yakni *level of collaboration*, *problem malignancy* dan *problem solving capacity*. Pengelolaan selama ini tidak maksimal karena tiga variabel independen tersebut. Level kolaborasi yang belum baik diukur dari banyaknya institusi mengurus bidang kelautan dan perikanan sehingga akan menimbulkan koordinasi yang lama. Belum lagi dengan variabel bahwa setiap institusi memiliki kepentingan yang dikontestasikan atau ego sektoral yang dirivalitaskan dengan tingkat kerumitan masalah IUU *fishing* yang merajalela dan merugikan pendapatan nasional. Di sisi lainnya adalah menimbulkan kapasitas penyelesaian masalah yang tidak korelasi sebut saja antara KKP dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang telah dijelaskan di atas. Apabila ini terus terjadi akan menimbulkan 3 karakter yaitu a) Problem itu mengarah pada

belum optimalnya koordinasi, b) Problem itu *asymmetry*, c) Memiliki apa yang disebut *cross-cutting cleavages* bisa saja saling memotong tanggung jawab atas nama kekuasaan. Penulis tetap sepakat dan konsisten, bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Susi harus bersifat kontinyu dan tidak boleh dihalangi dengan membandingkan tiga variabel di atas. Bourdieu menyebutkan ini sebagai habitus. Habitus itu sebuah sistem kognitif ide yang menyangkut persepsi, apresiasi dan aksi. Habitus adalah sistem nilai historis yang akan melandasi gerak dalam menyelesaikan ranah kepentingan sosial ekonomi. Sehingga demi melindungi dirinya dari krisis dan kritis realitas bahwa Indonesia selalu dirugikan untuk konteks ini sehingga perlu aksi yang konkrit. Walaupun Menteri Susi berpikir visioner dengan setidaknya melakukan tiga hal yaitu *institutional setting* dengan basis doktrin Indonesia adalah negara maritim dan harus berjaya di negaranya sendiri. Doktrin ini menjadi domain institusi untuk terus beraksi dalam menghasilkan hasil tangkap ikan yang maksimal sampai muncul pernyataan "kalau yang tidak suka makan ikan, saya tenggelamkan". Konteks ini sudah menjadi persepsi yang melandasi aksi. Selain itu, *distribution of power* salah satu fakta dengan pembentukan satgas 115 yang telah disampaikan di atas serta *skill* dan *energy*, dalam konteks inilah Menteri Susi membuktikan karakternya bahwa skill dan pengalaman dalam pengelolaan ikan sudah menua. Dengan semangat tinggi Menteri Susi menyaksikan langsung penenggelaman kapal dan melihat langsung beberapa hasil tangkap nelayan sekalipun di tengah laut. Tidak ada satu keraguan pun dari karakter Menteri Susi dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Tentunya ini tidak lepas dari karakter aktif negatif tadi. Kembali Bourdieu menyebut ini dengan *doxa* yang artinya pakem atau sistem praktik yang harusnya menjadi landasan ketika berhadapan dengan masalah yang rumit. *Doxa*

adalah sistem ide kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah.

Lebih lanjut, dalam konteks **kontrol**, konsekuensi wilayah maritim dilihat sebagai kontrol hubungan antara manusia dan lingkungan. Teori geopolitik wilayah maritim sebagai salah satu faktor penting sebagai alokasi sumber daya negara, alokasi strategis wilayah negara dan kekuatan negara. Dalam konteks kesejarahan berarti laut sangat penting baik sebagai jalur perdagangan, sumber potensi negara serta sebagai kekuatan negara. Melihat konteks ini di Indonesia tentunya dengan adanya kebijakan Jokowi untuk mengembalikan maritim sebagai bagian sumber daya negara maka penting bagi penulis melihat potensi kemaritiman Indonesia secara komprehensif.

Ada kecenderungan bahwa geopolitik maritim sebagai basis kekuatan pengendalian wilayah dari jarak jauh dalam sistem internasional, sehingga entitas-entitas politik internasional bisa diketahui secara dominan. Entitas – entitas politik ini bisa dilihat antara hubungan manusia dan lingkungan bukan hanya memberi batasan tingkah laku manusia, akan tetapi juga memberi kesempatan besar bagi manusia untuk mengelola sumber-sumber produksi di laut. Sehingga, teknologi manipulasi lingkungan terhadap perilaku manusia. Pengaruh iklim, bentuk negara, serta geografis merupakan entitas dan sebagai identitas penting bagi negara dalam politik internasional.

Analisis Alfred T. Mahan menyimpulkan bahwa imperialisme Eropa bisa berjaya karena kemampuan mengontrol laut. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang merupakan negara-negara yang besar akibat kepemilikan dan pemanfaatan potensi laut dengan sangat baik. Mahan mengatakan bahwa potensi geografis, kependudukan, serta pemerintahan adalah potensi mengontrol sumberdaya laut lebih komprehensif sehingga menurutnya inilah ciri negara yang besar.

Dalam konteks inilah menteri Susi sebagai salah satu aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap kontrol wilayah maka konsekuensinya adalah terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan menurut pakar kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri<sup>8</sup> mengatakan bahwa potensi maritim Indonesia untuk mencapai target yang diinginkan maka harus melihat laut sebagai a) instrumen pertumbuhan ekonomi, b) peningkatan kelestarian budidaya dan masyarakat pesisir, c) pelestarian lingkungan dan melihat laut sebagai objek pemersatu bangsa dan negara. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang bersifat kelautan harus diarahkan pada a) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, b) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh, c) terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya meningkatkan potensi kelautan dan perikanan untuk mewujudkan Indonesia Poros Maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Implementasi ini juga dipengaruhi oleh karakter kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan nilai ekspor ikan Indonesia. Artinya Menteri KKP memahami betul potensi kelautan dan perikanan yang selama ini tidak menjadi orientasi pemerintah untuk menjadi sumber devisa negara. Menteri KKP yang seorang perempuan namun memiliki karakter dalam menerapkan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia untuk meningkatkan hasil ekspor ikan.

Dalam pola analisis kebijakan luar negeri Menteri KKP cenderung menggunakan karakter geopolitik *military projection*. Pendekatan geopolitik ini berfokus pada kapasitas militer. Namun perlu digarisbawahi adalah militer yang dimaksudkan bukan berkaitan dengan konflik atau peperangan akan

---

<sup>8</sup> Fathun, op.cit

tetapi konsep yang dimaksudkan oleh penulis Menteri KKP menggunakan instrumen “Peledakan Kapal atau penenggelaman” yang cenderung lebih koersif.

Model yang dikembangkan oleh William D. Coplin dengan strategi aktor rasional, model ini menitikberatkan pada kalkulasi rasional aktor. Model ini bertumpu pada situasi sistem internasional, persepsi aktor, politik elite, kapabilitas negara serta strategi negara lain. Perspektif ini merujuk pada (1) *leadership strategy* yang berkaitan dengan upaya menghilangkan kekerasan dalam setiap masalah kebijakan luar negeri, (2) *Concordance strategy* mengacu pada upaya saling menguntungkan (3) *accommodation strategy* artinya keseimbangan ketika ada negara yang dominan kapabilitasnya, dan (4) *confrontation strategy* ketika kemampuan suatu negara meningkat dan tidak bisa diimbangi. Dari empat model tersebut dalam penerapan implementasi kebijakan luar negeri oleh KKP menekankan pada dua variabel yaitu *leadership strategy* dan *confrontations strategy*.

Kombinasi dari kedua strategi ini menjadi fakta konkrit bahwa terjadi peningkatan pendapatan sektor KKP dibandingkan dengan Kementerian lainnya terkhusus tahun 2014-2017. Data membuktikan bahwa hasil devisa negara yang diperoleh dari pengelolaan kelautan dan perikanan selalu meningkat setiap tahun.

Data PUSKAPTIK KKP RI tahun 2014 menuliskan produksi perikanan Indonesia mencapai Rp 213 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 155 triliun. Tren produksi perikanan Indonesia mengalami pertumbuhan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 23,22 persen dengan rata-rata sebesar Rp 145 triliun. Kontribusi nilai produksi perikanan tangkap terhadap nilai produksi perikanan nasional tahun 2015 sebesar 47,60 persen sedangkan kontribusi perikanan budidaya sebesar 52,40 persen tahun 2016.

Lebih lanjut, apabila dibandingkan penghasilan dari sektor Kelautan dan Perikanan

dalam pemasukan PDB Indonesia bahwa perekonomian sektor perikanan Indonesia tahun 2014 tumbuh sebesar 7,66 % dibandingkan tahun 2013, sedangkan dalam triwulan IV-2014 tumbuh sebesar 8,91 % dibandingkan triwulan 111-2014. Peningkatan perekonomian sektor perikanan secara total tahun 2014 lebih besar dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (4,18 %) dan sektor-sektor yang terdapat dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, seperti sektor pertanian, peternakan perburuan dan jasa pertanian (3,71 %), sektor tanaman pangan (0,24 %), sektor tanaman hortikultura (4,19 %), sektor tanaman perkebunan (5,83 %), sektor peternakan (5,44%), sektor jasa pertanian dan perburuan (2,58 %) dan sektor kehutanan dan penebangan kayu (0,58 %). Peningkatan perekonomian sektor perikanan triwulan IV-2014 lebih besar daripada pertumbuhan perekonomian nasional triwulan IV-2014 sebesar 5,01 % dan peningkatan perekonomian sektor perikanan secara total tahun 2014 lebih besar daripada pertumbuhan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,02 %.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku sektor kelautan dan perikanan. Faktor yang mempengaruhi peningkatan daya beli ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya hingga triwulan III 2014, seperti produksi rumput laut mencapai 6 juta ton dibandingkan pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya hanya mencapai 5,6 juta ton sedangkan produksi perikanan tangkap tahun 2014 (angka sementara) mencapai 5,78 juta ton, mengalami pertumbuhan sebesar 1,28 % bila dibandingkan tahun 2013. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ekspor perikanan pada semester I tahun 2015 dapat menembus hingga USD 2,5 miliar.

Buku Putih KKP tahun 2018, menyebutkan pada 2016, total produksi

perikanan mencapai 23,5 juta ton, dengan rincian perikanan budidaya sebanyak 16,68 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 6,48 juta ton. Produksi perikanan nasional pada 2016 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 22,31 ton. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan juga naik, dari Rp 189 triliun pada 2014 menjadi Rp 214,52 triliun pada tahun 2016 atau tumbuh 13,5 persen. Pertumbuhan PDB sektor perikanan lebih cepat dibandingkan sektor pertanian dan kehutanan dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun hingga semester I 2017, PDB sektor perikanan mencapai Rp 169,76 triliun. Dalam rencana strategis 2015 – 2019, KKP menargetkan pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 12 persen pada 2019. Potensi kawasan perikanan budidaya laut mencapai ±12 juta hektar.

Namun, total luas pemanfaatan lahan budidaya laut baru mencapai ± 285.527 hektar atau sekitar 2,36 persen dari total potensi yang ada dengan capaian volume produksi budidaya laut hingga akhir 2016 mencapai ± 11.762.420 ton atau naik 4 persen dari tahun sebelumnya. Komoditas yang akan dipilih adalah kakap putih mengingat kakap putih memiliki permintaan dan pasar ekspor yang lebih luas dibandingkan kerapu.

KKP menargetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai Rp 56,4 miliar per tahun. Kluster-kluster tersebut antara lain di Bali, Natuna, Konawe Selatan, Ambon, Lampung, dan Padang. Harapannya produksi budidaya kerapu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.

**Gambar 2.** Produktifitas Hasil Ikan Indonesia

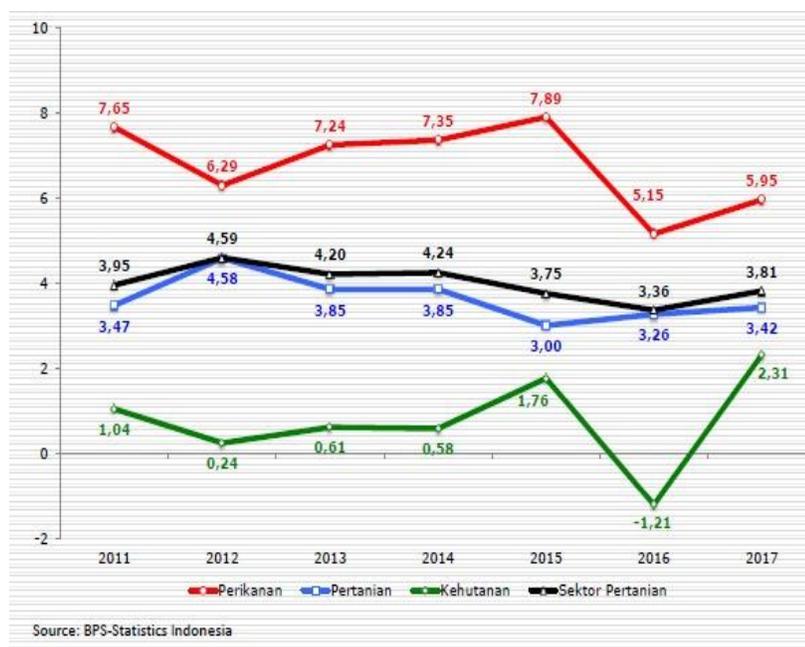


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak 250 unit (1.000 lubang), yang diharapkan akan mampu menghasilkan produksi lebih dari 342 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± Rp 34 milyar. Secara nasional capaian produksi perikanan budidaya nasional menunjukkan tren positif dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) dengan rata-rata kenaikan sebesar 19,08%, begitupun dengan nilai produksi mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,08%. Nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) dalam kurun waktu tahun 2014 – kuartal I 2017 mengalami kenaikan rata-rata 1,18%. Kuartal I tahun 2017 nilai NTUP mencapai 109,69%, yang dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan masyarakat memiliki tingkat efisiensi usaha yang baik, tahun 2019 total produksi perikanan budidaya nasional diproyeksikan mencapai 31,3 juta ton, yang sebesar 11,7 juta ton merupakan produksi ikan. Produksi perikanan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kembali pada konteks dengan kemampuan kontrol inilah juga menjadi bukti bahwa kepemimpinan Menteri Susi bisa menjadi figur baru dalam kebijakan publik Indonesia. Artinya mengapa ini penting akan memacu ide agensi lainnya untuk bertindak dengan pola yang sama ketika berhubungan dengan kerumitan masalah. Tindakan tidak selalu berhubungan dengan jenis kelamin. Bourdieu juga mengatakan konteks ini sebagai upaya penguasaan kapital nasional. Kapital ekonomi, sosial budaya dan simbol. Simbol dalam arti bahwa Menteri Susi menjadi representasi yang dianggap selalu bisa melakukan sesuatu yang fantastis demi kepentingan negara. Banyak fenomena yang harusnya bisa menggunakan pola ini walaupun dengan metode yang berbeda. Karena yang namanya metode akan berkembang sesuai dengan dinamika realitas. Modal kapital potensi ekonomi laut begitu besar maka apabila tidak dikelola dengan baik maka kepemilikannya untuk menjadi simbol negara maritim dan mampu mengelola potensi maritim hanyalah tekstual saja bukan kontekstual.

**Gambar 3.** Grafik Produktivitas Ikan Nasional



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Lebih lanjut, dalam **konteks akses** dalam analisis geostrategi dengan model implementasi *leadership (siapa kita)* maka sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan itu, Indonesia sebagai negara maritim wajar jika memiliki target tinggi untuk mencapai hasil maksimal dalam bidang pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Bahkan Menteri Susi berucap dari hasil kelautan dan perikanan saja mampu membiayai devisa negara Indonesia yang bisa mencapai 3000 triliun rupiah bahkan menurut Bernard Limbong bisa mencapai 7200 triliun rupiah. Dengan mengenali potensi itu dan juga menjadi tujuan maka strategi memimpin maksudnya disini adalah untuk mampu berdiri sendiri dan mengelola sendiri hasil kelautan dan perikanan. Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil perikanan membawa devisa negara yang sangat baik bagi PDB nasional. Bahkan telah menjadi tren nasional KKP selalu teratas dalam laporan kinerja kelembagaan. Terkait dengan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia KKP menjadi bukti konkrit bahwa **apa yang kita inginkan** seperti analisis geostrategi harus dirancang dengan baik. KKP memiliki tiga doktrin yang menjadi kunci dalam peningkatan hasil KKP yaitu kedaulatan yang berupaya menjaga integritas wilayah NKRI sebagai bentuk bela negara dan menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum sebagai negara pantai dan negara pulau, kemudian doktrin keberlanjutan yaitu berhubungan pengelolaan potensi nasional yang bersumber dari laut harus bisa membiayai pembangunan nasional dan konsisten menjadi salah satu pendapatan nasional yang menyumbangkan devisa bagi NKRI.

Berkelanjutan juga artinya pengelolaan harus bersifat kontinyu dan bersifat jangka panjang, karena Indonesia akan tetap terus hidup dalam jangka yang lama untuk itulah pengelolaan sumber daya nasional harus diarahkan dengan baik. Selanjutnya kesejahteraan, doktrin ini merujuk pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

sangat menjanjikan bagi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin “nenek moyang kita sang pelaut” bisa diterapkan dengan ini. Selain itu, membuktikan pernyataan Menteri KKP juga bahwa hanya dengan pengelolaan sumber daya laut mampu menghasilkan sumber devisa negara yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat nelayan di pesisir maupun pebisnis perikanan.

Geostrategi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan paradigma konfrontasi. Konfrontasi maka logika berpikirnya adalah *rational choice* dengan basis pendekatan menggunakan militer. Militer dalam konteks ini adalah dengan menggunakan *soft* militer artinya berhubungan dengan logika implementasi untung rugi sehingga Menteri Susi dengan pendekatan penenggelaman dan pemboman kapal adalah pemikiran *shock therapy* akibat kerugian signifikan dari hilangnya pendapatan negara dari pencurian ikan secara ilegal. Dalam arti bahwa cenderung bertentangan merujuk pada aksi itu dimana perempuan mampu bertindak tegas dan selama ini pula tidak pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya walaupun mereka laki-laki. Argumentasinya sederhana ketika berhadapan dengan masalah yang berulang dan tingkat kerumitannya tinggi dan tingkat kerugiannya tinggi, maka siapapun bisa bertindak anarkis. Anarkis dalam arti semantik *soft* militer. Dengan logika konfrontasi berbasis pada untung rugi sehingga mampu menerapkan implementasi kebijakan luar negeri yang mencitrakan Indonesia sebagai negara yang kuat memberantas kegiatan ilegal. Mengapa ini harus dilakukan, seperti juga apa yang dikatakan oleh Bourdieu bahwa ada *variabel illusion* atau sederhananya adalah *goals* atau kepentingan yang harus diperjuangkan. Kepentingan itu menyangkut harkat dan martabat negara atau kedaulatan, patriotisme aktor negara atau menjaga keamanan dan tentunya paling penting

adalah nasionalisme aktor negara dalam menjaga kesejahteraan nelayan yang juga sejalan dengan kapital Indonesia dalam bidang kelautan dan perikanan.

### **Kesimpulan**

Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 memberi warna dalam model kebijakan luar negeri Indonesia. Transformasi kebijakan luar negeri Indonesia yang melanjutkan kebijakan luar negeri SBY sebelumnya merupakan cara Jokowi dalam merubah citra Indonesia di panggung internasional. Pergeseran model kebijakan luar negeri Indonesia untuk menjadi negara yang berbasis pada sumber daya maritim atau sumber daya laut maka kebijakan ini terlihat sebagai warna baru walaupun sebelumnya Soekarno pernah menginginkan Indonesia untuk menjadi negara bahari. Konteks diksi kata memang sangat berbeda namun dari segi substansi makna cenderung sama yakni menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan maritim. Munculnya kebijakan luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Jokowi merupakan sebuah tesis baru apabila bisa terimplementasikan dalam aksi di lapangan.

Untuk mewujudkan hal tersebut Jokowi gencar mempromosikan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada ekonomi maritim dan bertujuan sebagai negara poros maritim di dunia. Kebijakan Jokowi dipromosikan sebagai marketing politik untuk menarik minat investasi kerjasama dari sejumlah relasi dalam sejumlah konferensi-konferensi internasional. Dalam setiap pidato Jokowi selalu menyisipkan tujuan Indonesia tersebut sebagai agenda penting Indonesia dalam masa pemerintahannya yakni sebagai negara poros maritim dunia.

Demikian pula yang terjadi dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 2015. Konferensi Asia Afrika yang kebetulan dilaksanakan di Indonesia merupakan prospek yang potensial bagi Jokowi untuk kembali

menjadikan isu kerjasama maritim sebagai instrumen kebijakan luar negerinya. Dan jelas saja di sela-sela sambutan kepala negara Jokowi melontarkan kembali kerjasama maritim sebagai isu penting dalam menyambut konferensi Asia Afrika.

Konteks ini tidak terlepas dari pengaruh latar belakang sejarah bangsa Indonesia sebagai negara yang luas dari segi laut. Pengalaman masa lalu dijadikan tolok ukur untuk membangkitkan kembali semangat nusantara yang telah lama punah dan bukan menjadi prioritas. Realitas ini tidak terlepas pula dari karakter pribadi Jokowi untuk menampilkan sesuatu yang beda dengan presiden sebelumnya. Fenomena holistik dalam konteks kebijakan luar negeri Jokowi tergambar jelas ketika menyampaikan pidatonya yang memang sebelumnya sudah tercatat dalam visi dan misi Jokowi JK ketika mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Konsekuensi dari model kebijakan luar negeri tersebut menjadikan Indonesia harus mampu mengkombinasikan setiap model kebijakan. Dalam analisis Coplin di atas terjadi kolaborasi pendekatan *leadership*, koorkondanse, akomodasi dan konfrontasi. Namun, dari setiap model tersebut kecenderungan Indonesia menerapkan kombinasi konfrontasi dan *leadership*. Hal ini dilakukan dengan argumentasi bahwa Indonesia sebagai negara besar dan kerugian ekonomi menjadikan sebuah dilema.

Doktrin maritim tersebut menjadikan implementasi kebijakan luar negeri dikelola melalui pendekatan organisasi. Organisasi yang dimaksudkan adalah KKP yang di bawahi Menteri Susi. Dengan karakter psikologis analisis aktif negatif menjadikan Menteri Susi menggunakan kombinasi geostrategi untuk mengelola hasil laut. Hasil laut menurutnya bisa dikelola dengan maksimal dan bahkan mampu membiayai APBN Indonesia. Konsekuensinya adalah logika kebijakan yang diterapkan

menggunakan *soft* militer dengan penenggelaman kapal. Penenggelaman ini menjadi metode deterens, defensif, sekaligus ofensif bagi pelaku pencuri ikan di laut Indonesia.

Kombinasi ini diawali karena dilema keamanan domestik yang belum maksimal mengelola hasil laut Indonesia. Akibatnya, penenggelaman menjadi *shock therapy* untuk menakuti sekaligus menjadi senjata yang menguatkan mental Indonesia bahwa hasil laut Indonesia harus dikelola oleh nelayan Indonesia sendiri, walaupun ingin terjadi kolaborasi maka melalui kerjasama ekonomi.

Penenggelaman ini terus menjadi strategi untuk meningkatkan kembali produktivitas hasil laut Indonesia yang diambil secara ilegal. Faktanya terjadi saling tumpang-tindih kebijakan antara Menteri Susi dan Menteri Luhut dalam pengelolaan ini. Menteri Susi lebih bicara logika untung rugi dan Menteri Luhut lebih kepada kesesuaian. Penulis sendiri lebih dominan mendukung kebijakan Menteri Susi. Hal ini terjadi karena tingkat kerumitan masalah sudah akut sehingga butuh ketegasan. Selain ketegasan juga yang dibutuhkan adalah kolaborasi, apalagi ada lebih dari 13 institusi mengurus masalah kelautan di Indonesia. Hal ini harus dikoordinasikan kembali dalam bentuk pembagian kekuasaan jangan sampai terjadi kontestasi kepentingan seperti kedua menteri tersebut. Fakta lainnya adalah terbentuknya satgas 115 merupakan langkah nyata untuk menspesifikkan pengelolaan hasil laut terutama akibat terjadinya perilaku ilegal dalam mengambil hasil laut di Indonesia.

Oleh sebab itulah, dengan kajian ini semoga mampu menambah khasanah keilmuan dalam hubungan internasional terkhusus kajian maritim.

## Daftar Pustaka

- Abi Hara, Abu Bakar. (2011) Pengantar Analisis Politik Luar Negeri, Dari Realisme Samapi Konstruktivisme. Bandung:NUANSA.
- Carlesnaes, Walter , Dkk.(2013). Handbook Hubungan Internasional. Bandung: Nusmedia.
- Coplin, Wiliam D.(1992) Pengantar Politik Internasional, Terjemahan Mercedes Marbun: Edisi Kedua. Bandung: Sinar Baru.
- Hanrieder, Wolfram. (1971). Comparative Foreign Policy, Theoretical Essay. New York: David Mc. Kay Company, Inc.
- Hudson, V.M.(2008) The History and Evolution of Foreign Policy Analisis . In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne, (Eds), Foreign Policy: theories, actors, cases. , Oxford: Oxford University Press.
- KKP RI. (2018) Buku Putih KKP. Jakarta: KKP RI.
- Laporan Kinerja Dirjen pengawasan KKP RI Kemeentrian Kelautan dan Perikanan: Jakarta.
- Laporan Kinerja Kemeentrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data Statistik dan Infomasi. 2014. Jakarta: KKP RI.
- Laporan Kinerja Kemeentrian Kelautan dan Perikanan, Pusat Data Statistik dan Infomasi. 2017. Jakarta: KKP RI.
- Mintz, Alex, DeRouen.(2010) Understanding Foreign Policy Decision Making. Cembridge: University Press.

- Muhammad , Fathun Laode. (2017).Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi. *Power in International Relations 1, 2*.
- Octavian Amarulla.(2012). Militer dan Globalisasi. Jakarta : UI Press.
- Rosenau, James N. (1981) The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics. New York: Nichols Publishing.
- Siombo, Ria.(2010) Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Stefanus, Dicky dan Adiyanto, Eko (2015). Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: Gramedia.
- Sulistianingtyas, Tri, Susanto dan Dicky Munaf. (2015) Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut. Jakarta: Gramedia.
- Sumardjono. (2009) Membangun Angkatan Laut Menuju Keamndirian. Jakarta: Dinas Perangan Angkatan Laut.
- Suprianto, Makmur. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Tovy. Tal The Changing Nature of Geostrategy 1900–2000 The Evolution of a New Paradigm. Alabama: Air University Press Air Force Research Institute.
- Tuathail, Gearoid O, et al. (1998). The Geopolitics Raeder. London: Routledge 11 New Fetter Lane.
- Warsito, Tulus. (1998) Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasanya. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.